

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

1. C.S.T Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka.
2. _____, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka.
3. Erdianto Effendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Bandung : Refika Aditama.
4. F. Sugeng Istanto, 2014, Hukum Internasional, Cahaya Atma Pustaka.
5. Farhana, 2010, Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika.
6. H. Salim , 2013, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Jakarta : PT. Raja Grafindo.
7. Henny Nuraeny, 2013, Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya, Jakarta : Sinar Grafika.
8. _____, 2016, Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia, Jakarta : Rajawali Pers.
9. J.M. Van Bemmelen, 1987, Hukum Pidana 1 Hukum Pidana material bagian umum, Bandung : Binacipta.
10. Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, 2011, Perdagangan Orang : Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia, Bandung : Citra Aditya Bakti.
11. _____, 2012, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika.
12. Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta : Rineka Cipta.
13. Muchsin, 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
14. Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
15. P.A.F Lamintang, 2013, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung : Citra Aditya Bakti.
16. Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya : Bina Ilmu.
17. Satjipo Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Semarang : PT Citra Aditya Bakti.
18. _____, 1983, Masalah Penegakan Hukum, Bandung : Sinar Baru.
19. _____, 2000, Ilmu Hukum, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
20. _____, 2014, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya.
21. Shanty Dellyana, 1998, Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta : Liberty.
22. _____, 1988, Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta : Liberty.
23. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
24. Soerjono Soekanto, 1980, Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, Jakarta : Rajawali.

25. _____, 1983, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta : UI Pres.
26. _____, 1985, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
27. Zainuddin Ali, 2010, Metode Penelitian Hukum, Cetakan II, Jakarta : Sinar Grafika.
28. _____, 2015, Metode Penelitian Hukum, Cetakan VI, Jakarta : Sinar Grafika.

2. Jurnal

1. Bambang Widiyahseno dkk, 2018, *Paradigma Baru Model Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2017*, Sosio Informa Vol. 4, No. 03.
2. Fara Gold, , 2003, “*Redefining the Slave Trade : the Current Trends in the International Trafficking if Women*”, *University Of Miami International and Comparative Law Review*, volume 11.
3. Moises Na'im, 2002, “*The Fourth Annual Grotius Lecture : Five Wars of Globalization*”. *American University Of International Law Review*, volume 18.
4. Tonny Rompis, 2015, Menurunnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Hukum dan Aparat Penegak Hukum di Sulawesi Utara, *Kajian Sosiologi Hukum, Lex Crimen vol. IV ,no. 8.*
5. Udiyo Basuki, 2017, “Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Perdagangan Orang Perspektif Hak Asasi Manusia”, Vol.13, UIN Sunan Kalijaga : Fakultas Syari'ah dan Hukum.
6. Tonny Rompis, 2015, Kajian Sosiologi Hukum tentang Menurunnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Hukum dan Aparat Penegak Hukum di Sulawesi Utara, *Lex Crimen Vol. Iv/No. 8.*
7. Syalom Walintukan, 2018, Batas-Batas Berlakunya Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan Menurut Tempat (Pasal 2 sampai 8 KUHP) Dari Aspek Perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia Diluar Negeri, Vol. 7 No. 7.
8. R. Valentina Sagala, 2010, “Membaca UU PTPPO dalam Perspektif HAM”, *Jurnal Perempuan*, Vol. 8, No.68.

3. Peraturan perundang-undangan

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5.

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58.
4. PERMEN Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perjanjian Kerja Bagi Tenaga Kerja Migran, Berita Negararepublik Indonesia 2019 Tahun 729.
5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.104A/MEN/2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja di Luar Negeri.
6. Perka BNP2TKI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perjanjian Penempatan Antara Badan Perindungan Pekerja Migran Indonesia dan Calon Pekerja Migran Indonesia.

4. Konvensi

1. Lembaran Negara. 2009/ No. 53 , Tln No. 4990, Ll Setneg : tentang Konvensi Pengesahan Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime di akses pada tanggal 12 November 2021.

5. Internet

1. 5 Asas Hukum Yang Wajib Kamu Tau <https://klikhukum.id/> diakses pada tanggal 28 Oktober 2021.
2. International Organization Migration Indonesia Perkenalkan Informasi Migrasi Tenaga Kerja Terstruktur Bagi Pencari Kerja Luar Negeri <https://Indonesia.iom.int/id/news/> diakses pada tanggal 2 Februari 2022.
3. Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Meningkat, Korban Mayoritas Perempuan dan anak <https://Nasional.kompas.com/read/2021/07/30/13464671/?page=all>, diakses pada 8 November 2021.
4. Kerangka Konsep <https://www.google.com/search?q=kerangka+konsep+yaitu&oq=kerangka+konsep+yaitu&aqs=chrome.69i59j0i22i30l2.3709j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>, diakses pada tanggal 12 Januari 2020.
5. Kerjasama Internasional Di Bidang Penegakan Hukum http://bphn.go.id/data/documents/kpd_-_2012_3.pdf. diakses pada tanggal 14 Januari 2021.
6. Mekanisme Kontraktual Atau Perjanjian <http://dosen.univpancasila.ac.id/dosenfile/3090211014155540340916april2019.pdf>. diakses pada tanggal 15 Januari 2022.
7. Penegakan Hukum <http://eprints.umm.ac.id/39219/3/bab%20ii.pdf> diakses pada tanggal 2 Februari 2022.
8. Pengertian Kerangka Teori <https://www.gramedia.com/literasi/kerangka-teori/> diakses pada tanggal 2 Februari 2022.
9. Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli Website <http://tesishukum.com/> di akses pada 29 Oktober 2021.
10. Pengertian Unsur dan Asas Hukum Ekstradisi <https://www.kajianpustaka.com/2019/06/> diakses pada tanggal 15 Januari 2022.

11. Perdagangan Perempuan Dan Anak Meningkat 6,25 Persen <https://infoanggaran.com/detail/> diakses pada tanggal 12 November 2021.
12. Perlindungan Hukum Contoh dan Cara Memperolehnya <https://www.hukumonline.com/berita/a/lt61a8a59ce8062>, diakses pada tanggal 12 Desember 2021.
13. Perlindungan Hukum http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1816/5/138400101_file5.pdf. diakses pada tanggal 2 Februari 2022.
14. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-18-2017>, diakses pada tanggal 10 November 2021.
15. Tinjauan Yuridis Penyaluran Tenaga Kerja <https://media.neliti.com/media/publications/59171.pdf>. diakses pada tanggal 11 Januari 2022.

